

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak

Aziz Febriadinata

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

E-mail : febri_aquariuz@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses dan hambatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh . Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan karena pada masyarakat atau kelompok peminjam dana pinjaman Program SPP tidak dikembalikan atau macet. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa panduan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi PNPM-MP pada program SPP di Desa Sungai Bakau Besar laut sudah cukup baik, tetapi masih terdapat masalah pada kelompok masyarakat peminjam dana program SPP di Desa Sungai Bakau Besar Laut serta belum dilibatkannya masyarakat pada tahap penentuan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, implementor harus melakukan pengawasan ekstra terhadap kelompok masyarakat yang meminjam dana rogram SPP dan perlunya masyarakat dilibatkan dalam penentuan kegiatan dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci : PNPM-MP, Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Abstrack

The purpose of this skripsi is want to know how the process and the obstacle in the PNPM-MP implementation especially in Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program in Sungai Bakau Besar Laut village Sungai Pinyuh subdistrict. The title of this skripsi based on the problems of people or groups who didn't return the money that they lend through the SPP Program. This research using descriptive research with qualitative rapprochement. The data accumulation instrument and the technique of this research are interview and observation guidance to get the complete data. This research show us that PNPM-M implementation especially SPP program in Sungai Bakau Besar Laut village Sungai Pinyuh subdistrict is good enough, but there still problems in people's group who lend the SPP's program money, and also people haven't involved yet in the determining activity phase and evaluation activity. The conclusion in this research are the implementor must take an extra control of people's group who lend the SPP's program money and also people need to involved in determining and evaluation activity.

Keyword : PNPM-MP, Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih dihadapkan pada 3 (tiga) masalah kemanusiaan yaitu kesenjangan distribusi pendapatan yang berdampak pada kesenjangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan (Widodo dalam Seliman, 2010:1). Untuk mengatasi masalah ini hal strategis yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat program yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Masih adanya masyarakat yang miskin menunjukkan bahwa diperlukan program-program guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi kehidupan masyarakat Kecamatan Sungai Pinyuh yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa diantaranya masih termasuk kategori miskin, gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia ini dapat menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat di Kecamatan Sungai Pinyuh. Berikut ini gambaran tingkat kemiskinan di Kecamatan Sungai Pinyuh.

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, salah satu program yang sedang dijalankan pemerintah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang telah dicanangkan oleh

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007, kegiatan ini merupakan penyempurnaan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sebelumnya (Pedoman Umum PNPM-MP, 2010: i).

PNPM-MP merupakan program pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan, pengangguran yang merupakan integrasi perluasan program penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada pembangunan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan dan berupaya mensejahterakan masyarakat penerima program, termasuk di dalamnya adalah menciptakan kesetaraan gender. Integrasi ini dilakukan dengan menggabungkan program yang telah terbukti efektif, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) wilayah pedesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di wilayah perkotaan. Pelaksanaan PNPM-MP juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM-MP, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

PNPM-MP ini juga diterapkan di Kabupaten Pontianak khususnya Kecamatan Sungai Pinyuh yang diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan

Aziz Febriadinata

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mandiri dalam pengambilan keputusan, pembangunan ekonomi dan infrastruktur mereka sendiri.

Desa Sungai Bakau Besar Laut Merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Pinyuh yang telah menjalankan PNPM-MP ini, adapun program yang telah berjalan di Desa Sungai Bakau Besar laut terbagi 2 (dua) jenis, yaitu pertama pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kedua pembangunan ekonomi yaitu program yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri, salah satu program yang telah berjalan yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari paparan yang telah peneliti jelaskan dilatar belakang mengenai PNPM-MP dalam menanggulangi kemiskinan, peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana “Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak”

3. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dibuatlah sebuah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah

dikemukakan sebelumnya, yaitu :
“Bagaimanakah Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Bakau Besar Laut?”

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan atau menemukan masalah-masalah yang menimbulkan hambatan dan mencari cara-cara penanggulangan hambatan itu. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Program (SPP) di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh. Hambatan dalam proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Program (SPP) di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya instansi terkait dalam membuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan selanjutnya

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi koreksi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Desa Sungai Bakau Besar Laut dalam pelaksanaan Program ini agar pelaksanaan selanjutnya berjalan dengan baik

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

sebagaimana yang diemukakan oleh Anderson dan David Easton (dalam Widodo, 2008:14) yang antara lain mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pmerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut peneliti, dapat diartikan bahwa kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang dimasyarakat. Masalah begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya.

Tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan kebijakan publik. Oleh karena itu, merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam kebijakan publik.

Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, tahap selanjutnya ialah implementasi kebijakan. Dimana implementasi merupakan bagian yang penting dari pembentukan proses kebijakan publik. Artinya, apabila setiap usulan kebijakan yang telah diputuskan lalu dilegalkan atau disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan maka keputusan atas kebijakan tersebut telah siap untuk diimplementasikan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa terwujud. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak bisa diwujudkan.

Dengan demikian, implementasi dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang pelaksanaan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) akan dipengaruhi oleh 4 elemen, sebagaimana yang dikemukakan Linneberry (dalam Tanuru, 2011:21), yaitu :

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana.
2. Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (*Standart Operating System / SOP*).
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Keempat aspek sebagaimana disebutkan diatas merupakan serangkaian tata pelaksanaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan publik, sehingga setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan berdasarkan pada penentuan unit pelaksana. Sehingga unit pelaksana yang berfungsi mengkoordinasikan dan juga mengelola bagaimana agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2. Metode penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan atau menggambarkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan fakta, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko dan achmadi, 2005:44). Adapun cara yang peneliti gunakan
Aziz Febriadinata
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive samplings* supaya dapat menjangkau informasi yang memadai sehingga dapat menemukan suatu model dari masalah yang akan diteliti oleh peneliti, maka semua informasi digali langsung dari beberapa informan yang terdiri dari Aparatur Desa Sungai Bakau Besar Laut, Fasilitator PNPM-MP Kecamatan Sungai Pinyuh, Masyarakat dari keluarga peminjam dana SPP.

Selanjutnya kegiatan untuk mengumpulkan data yang akan dianalisa, yaitu dengan turun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, pada triangulasi sumber ini Peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini peneliti bertujuan melakukan *check and recheck* hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui kebenaran data dengan menanyakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan masyarakat tidaklah sepenuhnya ikut terlibat, masyarakat hanya terlibat pada saat memberikan atau menyampaikan usulan kegiatan. Dalam proses penentuan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan masyarakat tidak terlibat didalam pengambilan keputusan tersebut. Sehingga pada tahap pelaksanaan kegiatan, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan serta harapan masyarakat.

Dari hasil pengamatan dilapangan peneliti juga menemukan masyarakat tidak terlibat dalam proses evaluasi dari pelaksanaan program atau kegiatan. Masyarakat selaku penerima manfaat dari program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM-MP hendaknya turut terlibat dalam evaluasi pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan turut terlibatnya masyarakat dalam tahap evaluasi ini akan memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi PNPM-MP khususnya pada program SPP untuk menentukan perencanaan program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya, sehingga program maupun kegiatan yang dilaksanakan nantinya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat.

Sedangkan dalam pelaksanaan program ini diharapkan masyarakat akan terlibat secara aktif dalam program tersebut

karena program SPP merupakan salah satu produk yang dibentuk oleh PNPM-MP dan termasuk dalam program pembangunan dengan memfokuskan pada ekonomi. Seperti namanya program SPP, program ini memang difokuskan untuk pemberdayaan dan pembangunan khusus pada perempuan saja. Kehadiran program SPP PNPM-MP di Desa Sungai Bakau Besar Laut, berawal dari adanya tawaran program Pemerintah, yaitu program dana pinjaman untuk pembangunan percepatan desa tertinggal. Dengan adanya program SPP ini, warga desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa mengkonsepkan proposal yang akan diajukan. Setelah hal tersebut mendapat tanggapan yang baik dari warga desa maka diadakan musyawarah desa dengan mengundang dusun – dusun untuk membahas mengenai penentuan desa mana yang akan didahulukan dan kebutuhan apa yang harus diprioritaskan lebih dahulu untuk kepentingan desa dan warga masyarakatnya, seperti pembangunan jalan atau bantuan modal guna pengembangan usaha masyarakat. Kemudian hasilnya di musyawarahkan lagi di kantor desa dan selanjutnya bila sudah ditentukan mana yang akan diprioritaskan, maka oleh fasilitator akan diajukan ke Kecamatan. Karena hal itulah mengapa masyarakat

seharusnya terlibat dalam semua proses implementasi program ini.

Dalam hal pelaksanaan program SPP ini peneliti juga menemukan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu macetnya pembayaran angsuran dana pinjaman SPP bagi setiap kelompok yang ada di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, Angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh masing-masing penerima manfaat sesuai dengan besar pinjaman yaitu angsuran pokok ditambah bunga. Dana pinjaman program SPP dapat dikembalikan dalam jangka waktu setahun. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara perbulan oleh ketua kelompok kepada unit pelaksana kegiatan, sedangkan sistem pembayaran angsuran dari anggota kelompok kepada ketua kelompok dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dari anggota kelompok tersebut. Pembayaran angsuran dari anggota kelompok kepada ketua kelompok dapat dilakukan dengan cara perhari, perminggu, maupun perbulan, dan yang terpenting dalam jangka waktu setahun tersebut dana pinjaman bisa dilunasi.

Namun, pada kenyataan yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukan bahwa pembayaran angsuran dana
Aziz Febriadinata
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

pinjaman dari program SPP ini tidak semuanya tepat waktu, Keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan pinjaman dari program SPP ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam menjalankan program lainnya. Apabila terdapat kelompok penerima manfaat dana dari program SPP yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman atau dikenal dengan kredit macet, maka kelompok penerima manfaat dana dari program SPP akan dipanggil, dan diberikan arahan, serta atau diberikan surat peringatan.

Dengan sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kelompok yang macet dalam pembayaran angsuran dana dari program SPP memang dirasa tidak tegas. Karena tidak ada sanksi yang jelas untuk kesalahan tersebut. Sehingga permasalahan ini masih dianggap biasa oleh masyarakat maupun kelompok yang bermasalah dalam pembayaran angsuran pinjaman. Dan hal ini mungkin menjadi sebuah dilema, karena disatu sisi sebaiknya dalam menghadapi masyarakat pedesaan setiap peraturan yang dijalankan harus bersifat fleksibel sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat, dan disisi lain apabila tidak terdapat sanksi yang tegas akan dikhawatirkan apabila terdapat permasalahan serius dalam kredit

macet maka masalah tersebut akan berlarut-larut dalam penyelesaiannya, untuk itu harus dibuat sebuah peraturan yang mengatur permasalahan ini.

2. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi PNPM-MP di Desa Sungai Bakau Besar Laut, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang peneliti alami. Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, pada penelitian ini peneliti tidak membahas PNPM-MP secara menyeluruh tapi hanya dibatasi pada program SPP, sehingga peneliti tidak bisa menggambarkan bagaimana implementasi PNPM-MP secara menyeluruh, kurang terampilnya peneliti dalam penyusunan kata-kata sehingga peneliti cukup mengalami kesulitan untuk menuangkan ide atau hasil pemikiran peneliti, keterbatasan lain yang peneliti rasakan yaitu peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan penelitian ini dapat di sempurnakan oleh peneliti lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Departemen Dalam Negeri, 2008, *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP)*. Jakarta, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Narbuko, Cholid., H. Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis*

Aziz Febriadinata

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing

Skripsi Dan Tesis

Seliman, Yuvinsius. 2010. *Skripsi : Analisis Deskriptif Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Sandai Tahun 2008*. Pontianak.

Tanuru, La. 2011. *Tesis : implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha di kota baubau*. Kendari.

Melalui <http://www.pustaka.ut.ac.id/pdf/tesis/40676.pdf>

Peraturan

-----, 2007. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNP -MP)*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : AZIZ FEBRIADINATA
NIM / Periode lulus : E 42009012 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU PEMERINTAHAN
Email address/HP : febri_aquartz@gmail.com 08999294289

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 11/1/2014

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 6 Januari 2014



Dr. H. Wiaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

(AZIZ FEBRIADINATA)